



KURIKULUM 1984
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(SMA)

GARIS – GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
(GBPP)

Mata Pelajaran : Tata Negara

Kelas : II (dua)

Semester : 3 dan 4

Program : Ilmu - ilmu Sosial



KURIKULUM 1984
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(S M A)
GARIS – GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
(G B P P)

Mata Pelajaran : Tata Negara

Kelas : II (dua)

Semester : 3 dan 4

Program : Ilmu - ilmu Sosial

KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 tentang perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus keputusan ini memenuhi tuntutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dimana dinyatakan bahwa sistem Pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang maka garis-garis besar program pengajaran (GBPP) mata pelajaran untuk semua jenis dan tingkat sekolah telah disusun.

GBPP mata pelajaran setiap sekolah disusun oleh para ahli dan tim pengembang GBPP melalui lima tahapan yaitu penentuan arah/tujuan dan ruang lingkup; penentuan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional; pemilihan materi/pokok bahasan yang penting bagi suatu mata pelajaran untuk tiap jenis sekolah; pendistribusian materi/pokok bahasan pada tiap kelas dan cawu/semester sekaligus dan pokok bahasan pada setiap cawu/semester itu diuraikan dan dilengkapi metode, penilaian serta sumber bahan, kemudian draft GBPP tersebut diujicobakan kepada guru-guru di lapangan untuk melihat keterbacaan dan keterlaksanaannya. Berdasarkan masukan dari guru di lapangan draft GBPP tersebut dimantapkan.

GBPP untuk semua jenis dan jenjang sekolah pada pendidikan dasar dan menengah digunakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1984/1985.

Dalam melaksanakan GBPP ini di sekolah perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dari Dirjen Dikdasmen, agar para pelaksana dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah GBPP mata pelajaran untuk semua jenis sekolah diterbitkan untuk disebarluaskan ke seluruh sekolah, agar kurikulum 1984 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jakarta, 2 Mei 1985

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Harsya W. Bachtiar

Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar
NIP. 130159838

GARIS - GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

SEKOLAH : SMA Kelas : II – Ilmu-ilmu Sosial
MATA PELAJARAN : TATA NEGARA

II . 17 . 0 Sos

TUJUAN KURIKULER	TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)	BAHAN PENGAJARAN		PROGRAM			METODE	SARANA/SUMBER	PENILAIAN	KETERANGAN
		POKOK BAHASAN	URAIAN	KLS	SEM	JAM PEL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Siswa memahami dasar-dasar umum ketatanegaraan	1. Siswa memahami tentang hakekat negara dan pengetahuan yang mengkaji masalah tersebut melalui pengamatan, klasifikasi, dan komunikasi.	1.1 NEGARA 1.1.1 Pengertian Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara 1.1.2 Pengertian Negara	Ilmu Negara mempelajari negara secara umum mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Ilmu Tata Negara mempelajari negara-negara tertentu, bagaimana pemerintahan negara itu disusun dan dijalankan, misalnya khusus mengenai Indonesia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan (Logeman) Negara ditinjau dari segi organisasi politik (Mc. Iver) Negara ditinjau dari segi organisasi kesusilaan (Hegel) Negara ditinjau dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat (Soepomo)	II	3	14	Ceramah Tanya Jawab Diskusi Pemberian tugas	TEORI DAN PRAKTEK TATA NEGARA, Durverger, Maurice, Jakarta ILMU NEGARA UMUM, Kranenburg ASAL MULA NEGARA, Prof. Nasroen PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA, Zaini Hasan, S. H.	Tes objektif Tes esai Laporan tugas	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								ASAS-ASAS HUKUM TATA NE- GARA, Sally Lubis, S. H.		
		1.1.3 Asal Mula Terjadi- nya Negara	Asal mula dan kejadian nega- ra ini ada beberapa teori dan ada pula yang menerangkan berdasarkan kenyataan - ke- nyataan yang nyata. Di antara teori-teori itu antara lain : Teori Ketuhanan ; Teori Perjanjian ; Teori Kekuasaan ; Teori Kedaulatan ;							
		1.2 UNSUR - UNSUR TERJADINYA NE- GARA				10	Ceramah Tanya Jawab Diskusi Pemberian tu - gas		Tes objektif Tes esai Laporan tugas	
		1.2.1 Daerah	Termasuk daerah suatu nega- ra ialah daratan, lautan, dan udara di atas teritorium darat an dan lautan itu.							
		1.2.2 Rakyat	Kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan te- kad untuk hidup bersama di dalam suatu kesatuan politik atau kenegaraan, yang akhir- nya terbentuk menjadi suatu bangsa.							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1.2.3 Pemerintah yang Berdaulat	Gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, dalam arti luas.							
		1.2.4 Pengakuan oleh Negara-negara lain	Unsur ini tidak merupakan syarat mutlak akan adanya suatu negara. Jadi hanya deklaratif bukan konstitutif.							
		1.3 TEORI – TEORI TUJUAN NEGARA				8	Ceramah Tanya Jawab Diskusi Pemberian tugas		Tes objektif Tes esai Laporan tugas	
		1.3.1 Kekuasaan Negara	Negara yang kuat kalau pemerintah berkuasa penuh terhadap rakyat (Lord Shang).							
		1.3.2 Perdamaian Dunia	Perdamaian dunia dapat diciptakan dengan adanya undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia (Dante Alleghiere).							
		1.3.3 Jaminan atas Hak dan Kebebasan	Hidup rakyat sebagai manusia dalam negara, bukanlah karena kemurahan hati pemerintah tapi berdasarkan hak-hak kekuatan sendiri (Immanuel Kant)							
		1.4 BENTUK NEGARA PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI		II	4	12	Ceramah Tanya Jawab Diskusi Pemberian tugas		Tes objektif Tes esai Laporan tugas	
		1.4.1 Bentuk Negara	Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi.							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		1.4.2 Bentuk Pemerintahan	Negara Gabungan dengan sistem federasi dan commonwealth. Monarchi merupakan bentuk pemerintah yang kepala negaranya diangkat berdasarkan waris atau keturunan. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat secara bebas untuk masa jabatan tertentu.							
		1.4.3 Bentuk Demokrasi Modern	Demokrasi yang representatif dengan sistem parlementer Demokrasi yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan Demokrasi yang representatif dengan sistem referendum							
	2. Siswa memahami dan menyadari arti pentingnya norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu atau secara internasional melalui pengamatan, klasifikasi, dan komunikasi.	2.1 NORMA-NORMA HUKUM 2.1.1 Pengaturan pergaulan Hidup dalam Negara	Dalam hidup bernegara diciptakan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara warganegara, dengan warganegara dan warganegara dengan negara			20	Ceramah Tanya Jawab Diskusi Pemberian tugas		Tes objektif Tes esai Laporan tugas	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2.1.2 Tata Hukum	Pengaturan pergaulan hidup terwujud dalam suatu Tata Hukum Negara yang meliputi: . Hukum Publik (Material dan Formal) mencakup : Tata Negara; Administrasi Negara; Pidana. Hukum Perdata (Material dan Formal) mencakup : Pribadi; Kekayaan; Perkawinan; Keluarga; Waris;							
		2.1.3 Peranan Hukum	Tujuan hukum ialah mencapai kedamaian, yakni keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Tugas hukum ialah mensekresikan antara kepastian (hukum) dengan keadilan (hukum). Sumber hukum ialah falsafah /dasar negara, konstitusi, traktat, doktrin, dekrit, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.							
		2.1.4 Hukum Internasional	Aturan-aturan yang berlaku untuk semua negara dalam melakukan tindakan internasional.							

